

KEBIJAKAN PUBLIK

Buku kebijakan publik ini diterbitkan sebagai bahan pengajaran dan bahan penambahan wawasan serta keilmuan khalayak umum, karena akan banyak berkontribusi, baik dibidang riset, pengetahuan, wawasan dan keilmuan bagi para calon sarjana maupun pembaca lainnya. Ditinjau dari definisinya, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seorang individu, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Setiap individu, kelompok maupun pemerintah masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda, hal itu terjadi dikarenakan setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan akan senantiasa memiliki perbedaan dan memiliki ciri khas di setiap lingkungannya. Buku ini layak dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pemahaman awal berbagai aspek pelayanan publik karena didalamnya dimuat pengertian serta evaluasi pelayanan publik. Ini adalah buku pengantar untuk mahasiswa atau siapa saja yang berminat mempelajari kebijakan publik.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-6092-82-8

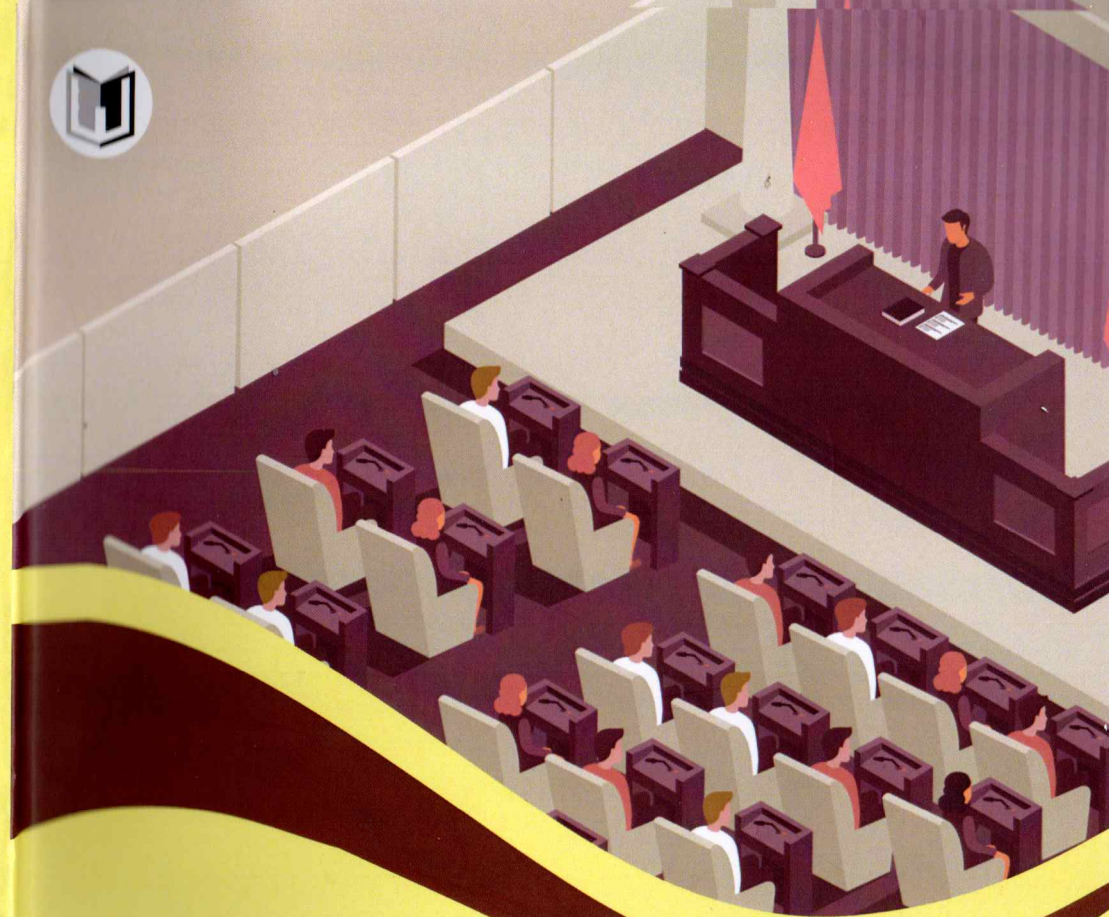


9

786236

092828

Kebijakan Publik



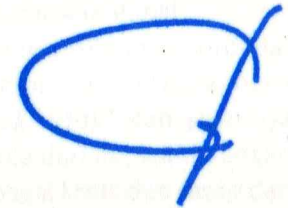
KEBIJAKAN PUBLIK

Tim Penulis :

Imanuddin Hasbi - Hartoto - Dyah Maharani - Sriyani - Ella Dewi Latifah
Ardhana Januar Mahardhani - Indri Arrafi J - Hikmah Nurain - Attifah Meita Rahmah
Ahmad Subaglyo - Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu - Charia Roswita
Renaldy Lukmanul Hakim - Khairul Rijal - Virginia Claudia Lao - Fajar Setyaning Dwi Putra



KEBIJAKAN PUBLIK



Tim Penulis :

Imanuddin Hasbi - Hartoto - Dyah Maharani - Sriyani - Ella Dewi Latifah
Ardhana Januar Mahardhani - Indri Arrafi J - Hikmah Nurain - Attifah Meita Rahmah
Ahmad Subagiyo - Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu - Charia Roswita
Renaldy Lukmanul Hakim - Khairul Rijal - Virginia Claudia Lao - Fajar Setyaning Dwi Putra

KEBIJAKAN PUBLIK

Tim Penulis:

Imanuddin Hasbi, Hartoto, Dyah Maharani, Sriyani, Ella Dewi Latifah, Ardhana Januar Mahardhani, Indri Arrafi J, Hikmah Nurain, Attifah Meita Rahmah, Ahmad Subagiyo, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Charia Roswita, Renaldy Lukmanul Hakim, Khairul Rijal, Virginia Claudia Lao, Fajar Setyaning Dwi Putra.

Desain Cover:
Usman Taufik

Tata Letak:
Aji Abdullatif R

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-6092-82-8

Cetakan Pertama:
Juli, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kebijakan Publik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Kebijakan Publik.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PUBLIK	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Kebijakan	2
C. Kebijakan publik	6
D. Ruang lingkup kebijakan publik	19
E. Rangkuman materi	23
BAB 2 EVOLUSI STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Pengertian evolusi studi kebijakan publik	25
C. Sejarah perkembangan kebijakan publik di dunia.....	28
D. Sejarah perkembangan kebijakan publik di Indonesia.....	31
E. Rangkuman materi	35
BAB 3 PENDEKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (MENURUT PARA TOKOH)	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Sejarah kebijakan publik.....	45
C. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli	47
D. Model kebijakan publik	50
E. Etika dan kebijakan publik.....	53
F. Rangkuman materi	56
BAB 4 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Gambaran umum kebijakan publik	59
C. Proses pembuatan kebijakan publik.....	61
D. Model kebijakan publik	70
E. Rangkuman materi	73

BAB 5 EVALUASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Pengertian evaluasi kebijakan	78
C. Sifat, tujuan dan fungsi evaluasi.....	79
D. Konsep evaluasi kebijakan	83
E. Tipe evaluasi kebijakan.....	84
F. Tahapan evaluasi kebijakan.....	86
G. Evaluasi dampak kebijakan.....	87
H. Rangkuman materi	89
BAB 6 PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Perubahan kebijakan	94
C. Terminasi kebijakan	96
D. Reformasi kebijakan	98
E. Model perubahan kebijakan.....	99
F. Jejaring kebijakan	101
G. Rangkuman materi	103
BAB 7 PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA "DUA ANAK CUKUP" OLEH BKKBN	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Teori dan tinjauan pustaka	111
C. Metodologi penelitian	113
D. Pembahasan	114
E. Rangkuman materi	126
BAB 8 PERAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK	131
A. Pengertian data dan informasi	131
B. Jenis-jenis informasi	132
C. Kebutuhan informasi dan pengolahan data	133
D. Kualitas informasi	133
E. Pentingnya informasi dalam pembuatan kebijakan.....	134
F. Informasi yang relevan dengan kebijakan.....	135
G. Kebijakan informasi	139

H. Kebijakan informasi di negara lain	140
I. Kasus Indonesia	142
J. Ruang lingkup hak atas informasi	144
K. Prinsip penting UU informasi	144
L. Penutup	145
M. Rangkuman materi	145
BAB 9 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK	149
A. Pendahuluan	149
B. Pengertian, unsur, tujuan dan fungsi hukum	151
C. Jenis-jenis hukum	153
D. Konsep dan pengertian tentang kebijakan publik	154
E. Hubungan antara hukum dan kebijakan publik	161
F. Rangkuman materi	167
BAB 10 ANALISIS PENDAPAT MASYARAKAT MENGENAI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKSUALITAS BAGI REMAJA	171
A. Pendahuluan	171
B. Teori dan tinjauan pustaka	173
C. Metode penelitian	174
D. Pengolahan data	175
E. Hasil dan pembahasan	175
F. Rangkuman materi	184
BAB 11 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI	189
A. Pendahuluan	189
B. Pengertian kebijakan publik bidang ekonomi	192
C. Proses kebijakan publik bidang ekonomi	192
D. Faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik bidang Ekonomi	193
E. Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik bidang Ekonomi	194
F. Faktor penghambat implementasi kebijakan publik bidang Ekonomi	195
G. Diskusi kasus kebijakan publik bidang ekonomi	196
H. Rangkuman materi	199

BAB 12 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI	203
A. Pendahuluan	203
B. Definisi kebijakan publik	210
C. Kebijakan publik bidang transportasi udara	212
D. Kebijakan publik bidang transportasi laut	213
E. Kebijakan publik bidang transportasi darat	215
F. Kebijakan publik bidang transportasi sungai/danau	219
G. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait penegakan kebijakan publik bidang transportasi	221
H. Rangkuman materi	223
BAB 13 TRANSFORMASI KEWARGANEGARAAN DIGITAL DAN KEAMANAN SIBER NASIONAL ABAD 21	227
A. Pendahuluan	227
B. Transformasi kewarganegaraan ke arah kewarganegaraan Digital	228
C. Media sosial	229
D. Era revolusi industri 4.0 sebagai abad keterbukaan dan literasi Digital	230
E. Urgensi keamanan siber nasional	232
F. Rangkuman materi	238
GLOSARIUM	242
PROFIL PENULIS	250

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir. (1994). *Implementasi Kebijakan*. Modul Kursus TMPP MAP-UGM, Yogyakarta
- Dunn, William N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gajah Mada University Press
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Harris, Abdul. (2010). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Press
- Ismaly, Irfan Drs. M.MPA. (2002). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Julia, Sopha. (2010). *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Landon: Queen Mary Westfield College University
- Riyanto, Bambang. (1997). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. BPFE, Yogyakarta
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wibawa, Samodra, dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. (2002). *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada
- Winarno, Budi. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Press (Anggota IKAPI)
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, CAPS*, Yogyakarta

BAB

6

PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENDAHULUAN

Istilah administrasi publik banyak disampaikan oleh para ahli, salah satunya adalah Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses tentang tata laksana sumber daya dan personel publik yang telah dikoordinasikan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam sebuah kebijakan publik (Chandler et al., 1988). Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dalam hal ini adalah masyarakat. Proses kebijakan publik merupakan hasil dari seluruh aktivitas sosial masyarakat yang sangat dinamis, diawali dengan proses perumusan kebijakan dengan tahap identifikasi masalah, rumusan tujuan, identifikasi alternatif kebijakan, peramalan sebab akibat dari kebijakan, dan diakhiri dengan memilih alternatif terbaik yang akan diimplementasikan oleh pemerintah kepada masyarakat (Mahardhani, 2018). Seluruh bagian tersebut merupakan suatu aktivitas berantai dan sistemik yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang cepat berubah. Kecepatan perubahan dan dinamika sosial masyarakat selalu dengan cepat juga akan direspon oleh

pemerintah sebagai salah satu aktor dalam kebijakan publik melalui proses perubahan dalam kebijakan publik.

Aktor dalam kebijakan publik memegang peran yang penting. Moore menyebutkan bahwa ada tiga aktor yang dominan dalam proses penyusunan kebijakan publik, yaitu aktor privat, aktor publik, dan *civil society* (Moore, 1995) sedangkan dalam konteks Indonesia ketiga aktor tersebut dapat lebih diperinci yaitu aktor publik merupakan aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden, aktor privat yaitu beberapa kelompok yang terlibat secara penuh dalam agenda kebijakan, dan *civil society* merupakan aktor pada komunitas yang meliputi pihak-pihak yang bersifat *asosiasional* (Badjuri & Yuwono, 2002). Aktor mempunyai makna dalam sebuah kebijakan publik sebagai seorang pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interrelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik (Pritasari & Kusumasari, 2019)

B. PERUBAHAN KEBIJAKAN

Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam kebiasaan sehari-hari kita, meskipun demikian kata tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah maupun masyarakat sendiri sering menggunakan kata tersebut dengan peruntukan tujuan yang berbeda, seperti diperuntukkan untuk tujuan (*goals*) program, keputusan (*decision*), standar, proposal, dan grand design. Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Anderson, 1984). Kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoritis, Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a project program of goals, values, and practices*) (Tilaar & Nugroho, 2009). Banyak definisi tentang kebijakan publik seperti yang sudah terdapat pada bab sebelumnya, secara umum mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh negara

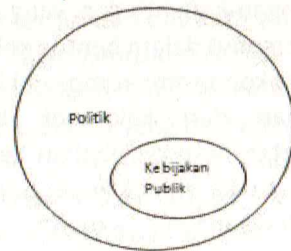
yaitu pemerintah sebagai bentuk strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara tersebut. Kebijakan publik merupakan strategi pemerintah yang digunakan untuk menjadikan masyarakatnya memasuki tahap awal, tahap menjadi masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2014). Sudah seharusnya kebijakan publik menggambarkan kepentingan rakyat, dengan banyaknya model dalam kebijakan publik menjadikan implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah juga berbeda-beda.

Adanya campur tangan pemerintah dalam proses kebijakan publik yang terkadang sangat besar menjadikan kebijakan tersebut murni dari tuntutan masyarakat atau didasarkan pada masalah yang terjadi di masyarakat. Justru faktor politis lebih terasa dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dye sebagaimana dinyatakan oleh Islamy (Suwitri, 2008) menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah menengahi konflik antar kelompok masyarakat yang harus segera diselesaikan melalui keluarnya kebijakan dengan cara (1) membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok, (2) mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang berbeda, (3) mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan negara, dan (4) memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak.

Munculnya tekanan dari kelompok kepentingan akan dapat mempengaruhi pembuatan atau perubahan kebijakan publik. Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan, dan kebaikan organisasi, kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya. Perumusan kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok secara terus menerus agar pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan memberikan respons terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut (*group pressures*) yaitu dengan melakukan tawar-menawar (*bargaining*), perjanjian (*negotiating*) dan kompromi (*compromising*) terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan lain yang berpengaruh. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari usaha pembuat kebijakan dalam menjaga keseimbangan (*equilibrium*) yang dicapai dari perjuangan kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda-beda (Suwitri, 2008).

C. TERMINASI KEBIJAKAN

Dalam terminologi administrasi publik Brewer dan deLeon menjelaskan bahwa terminasi dikaitkan dengan proses kebijakan publik dan menjadi bagian terpenting dari siklus kebijakan yang meliputi inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi (Keban,2015). Perubahan kebijakan dan terminasi kebijakan atau penghentian kebijakan merupakan tahapan dari kebijakan yang tidak semua ahli membahasnya. Sudah seharusnya terminasi kebijakan mempunyai tempat yang penting dalam urutan kebijakan, hal ini dikarenakan terminasi kebijakan merupakan langkah strategis dalam melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Selain itu terminasi kebijakan juga dalam rangka memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki dalam aktor kebijakan agar lebih efisien. Brewer menyebutkan bahwa terminasi merupakan sebuah cara dalam rangka penyesuaian (*adjustment*) kebijakan yang dirasakan *unnecessary*, *redundant*, *out-moded*, atau disfungsi (Keban,2015). Adanya upaya penggantian kebijakan tersebut mengarah pada aktivitas politik yang merupakan rumah dari kebijakan publik.



Gambar 1. Dinamika Kebijakan Publik
Sumber. (Nugroho, 2014)

Kebijakan tidak bisa dipisahkan dari politik karena sejatinya kebijakan publik merupakan bagian, atau interaksi simbolik dari politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Bahkan dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah melting pot atau merupakan hasil sintesa dari dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kultural di mana kebijakan itu sendiri berada (Nugroho, 2014). Meskipun demikian penggantian kebijakan yang lebih diarahkan oleh berbagai faktor politik tersebut, maka keberhasilan yang didapatkan dalam terminasi kebijakan merupakan bentuk dari aktivitas politik yang sangat

problematis dan mempunyai tujuan untuk merubah kebijakan yang disfungsi untuk pencapaian sasaran kebijakan secara optimal.

Terdapat beberapa tipe terminasi yang mencakup terminasi fungsional, terminasi kebijakan, terminasi organisasi, dan terminasi program.

1. Terminasi fungsional, yaitu terminasi yang terarah pada segala aktivitas dan tindakan eliminasi pada seluruh area kebijakan, yaitu meliputi organisasi atau kebijakan itu sendiri.
2. Terminasi Kebijakan, yaitu dilaksanakan untuk menghapus sebuah kebijakan pada saat teori dan pendekatan yang mendukung proses pembuatan kebijakan publik tersebut sudah tidak diakui kebenarannya oleh aktor kebijakan
3. Terminasi program, yaitu dilakukan untuk mengurangi, memilih memilah, dan bahkan sampai dengan menghentikan program-program yang dirasakan sudah tidak bermanfaat atau dianulir dalam peraturan formal
4. Terminasi organisasi, yaitu penghapusan organisasi yang disebabkan karena telah dihapusnya program-program yang sebelumnya ada sebagai bentuk dari implementasi kebijakan sebelumnya, serta dapat juga dikarenakan organisasi tersebut telah gagal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan pendekatan dalam terminasi kebijakan ada dua yaitu *'the big bang termination'* dan *'the whimper approach'*. *The big bang termination* merupakan pendapatan yang sering terjadi karena adanya suatu keputusan otoritatif atau sebuah pukulan yang menentukan dalam aktivitas di suatu waktu, sedangkan *The whimper approach* adalah merupakan penghapusan secara bertahap dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian terhadap suatu kebijakan, program, atau organisasi. Atau bentuk ini dapat diimplementasikan secara tindakan lain yaitu pengurangan anggaran dari sebuah organisasi yang dilakukan secara perlahan sehingga tidak dapat melakukan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, atau bisa juga dengan mengeliminasi secara perlahan dari posisi yang sudah ada sehingga sudah tidak ada ruang lagi untuk kebijakan tersebut melakukan aktivitasnya.

Meskipun muncul dalam siklus kebijakan publik namun terminasi kebijakan jarang dilakukan, banyak faktor diantaranya adalah keengganan para pemimpin politik maupun pemerintah untuk mengakui kesalahan di waktu lampau selain itu besarnya biaya untuk melakukan perubahan sebuah kebijakan terkadang tidak dijadikan prioritas oleh pemerintah untuk melakukan terminasi sehingga organisasi pemerintah sebagai implementator kebijakan terkadang tidak *up-to-date* dalam melakukan aktivitasnya hal ini sebenarnya juga dikaitkan dengan performa dari institusi tersebut.

D. REFORMASI KEBIJAKAN

Munculnya masa reformasi diawali dengan adanya tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan yang dilatarbelakangi oleh keadaan yang sudah rusak dan merupakan dampak adanya krisis moneter sejak lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Era selanjutnya yang merupakan era reformasi diawali dengan munculnya BJ. Habibie sebagai presiden di Indonesia. Pada masa tersebut terdapat banyak sektor yang mengalami penyesuaian dan perubahan secara besar-besaran sehingga stabilitas politik juga mengalami ketidakpastian. Menurut Prof. Mark Turner di Indonesia mengalami tiga kali reformasi kebijakan publik, yaitu pada tahun 1998 – 2003 melalui perubahan sporadis, tahun 2002 – 2010 adanya perubahan kebijakan yang berbentuk *targeted reform*, serta tahun 2010 sampai dengan reformasi birokrasi di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Arifia, 2020). Adanya perbedaan karakteristik kebijakan pada setiap masa menjadikan kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan baik dan bertahan lama. Mulai tahun 2010 dilakukan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi negara lainnya melalui undang-undang, peraturan, instruksi, sampai dengan surat edaran yang terkadang keluarnya aturan tersebut justru tidak efektif karena adanya tumpang tindih aturan. Reformasi kebijakan (*policy reform*) dilaksanakan sebagai sarana kontrol yang dilakukan oleh masyarakat atau aktor privat dari implementasi kebijakan, tentunya dari implementasi kebijakan akan dilanjutkan dengan proses evaluasi kebijakan yaitu apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diberhentikan, atau diubah. *Policy*

reform merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan dari adanya siklus kebijakan inti yang diawali dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak akan secara langsung digunakan sebagai bahan dalam formulasi kebijakan, akan dibutuhkan konsep ulang dalam menyusun formulasi kebijakan yaitu melalui reformasi kebijakan publik sebagai langkah kongkret untuk menemukan formula baru sebagai hasil dari memperbaiki formula yang sudah ada atau mengganti formula yang ada (Hayat, 2018).

Reformasi ini akan menjadi sarana pembaharuan pada sistem kebijakan publik yang termasuk di dalamnya adalah adanya pembaharuan pada sistem pemerintahan, oleh karenanya reformasi kebijakan akan memiliki garis linear dengan pelaksanaan desentralisasi sehingga kajian tentang otonomi dan *good governance* menjadi sangat penting. Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemerintahan yang baik akan memberikan hak seluas-luasnya untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam menyikapi kebutuhan masyarakat di daerah, oleh karenanya harus ada pemahaman bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk siapa dan mengapa kebijakan tersebut sampai dibuat serta yang tidak kalah penting adalah adanya evaluasi atas kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut.

E. MODEL PERUBAHAN KEBIJAKAN

Adanya ketidaksesuaian antara masalah yang terjadi di masyarakat dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah menjadikan tanda tanya besar dan harus segera dibenahi. Perubahan kebijakan dapat diambil melalui tiga bentuk, yaitu inkremental, pembuatan undang-undang baru untuk kebijakan khusus, dan penggantian kebijakan yang besar sebagai akibat dari adanya pemilihan umum kembali. Perubahan kebijakan dengan inkremental merupakan analisis sederhana yang digunakan oleh pemerintah dalam melihat suatu masalah, yaitu hanya di permukaan saja, sehingga adanya kecenderungan untuk kebijakan publik itu akan berubah sangat tinggi. Dalam model inkremental memiliki sifat yang pragmatis, tidak bermaksud mencari pilihan kebijakan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah yang muncul melainkan hanya sekedar mencari alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan segera (Maulana et al., 2018).

Perubahan kebijakan dengan bentuk inkremental ini pada hakikatnya mempunyai sifat merupakan perbaikan-perbaikan kecil dan lebih diarahkan sebagai bentuk perbaikan dari ketidaksempurnaan dari suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karenanya kebijakan ini hanya untuk mengatasi masalah yang sedang ramai pada saat itu saja.

Selain bentuk perubahan kebijakan di atas, menurut para ahli ada beberapa bentuk dari perubahan kebijakan, di antaranya Easton menyebutkan perubahan kebijakan terdiri dari tiga bentuk (Suwitri, 2008), yaitu: (1) Perubahan sedikit dari kebijakan yang telah dievaluasi, (2) Perubahan dengan merubah statuta dalam area kebijakan tertentu, (3) Perubahan drastis dari kebijakan publik sebagai konsekuensi dari munculnya pilihan alternatif yang baru. Lester dan Stewart menyebutkan bentuk perubahan kebijakan adalah: (1) Linear, (2) Merger program yang dirasa sesuai, (3) Pemisahan satu program menjadi dua atau tiga program baru, (4) nonlinier (Lester & Stewart, 2000). Selain itu terdapat tiga model perubahan kebijakan, yaitu: (1) Tesis Siklikal (*The Cyclical Thesis*), (2) Tesis Policy Learning, dan (3) Tesis Zig Zag (Kartawijaya, 2018).

1. Tesis Siklikal (*The Cyclical Thesis*)

Model ini menjelaskan bahwa perubahan dalam kebijakan disebabkan adanya pergeseran yang terjadi secara berkelanjutan dalam keterlibatan secara nasional, antara publik dan kepentingan privat.

2. Tesis *Policy Learning*

Model ini memandang bahwa terjadinya perubahan dalam kebijakan sebagai suatu fungsi dari tiga faktor penentu, yaitu pertama karena adanya interaksi dari koalisi dalam advokasi, kedua adalah adanya akibat dari parameter sistem yang stabil, dan ketiga adalah adanya perubahan eksternal terhadap sub sistem yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan baik dari internal atau eksternal.

3. Tesis Zig Zag

Model ini mempunyai karakteristik dari pola zig-zag *effect* atau dari respons dan stimulus. Adanya koalisi antar masyarakat akan sangat berguna dalam mengatasi adanya pergeseran-pergeseran perubahan kebijakan.

F. JEJARING KEBIJAKAN

Network theory (teori jejaring) berkaitan dengan mekanisme serta proses yang berinteraksi dengan struktur jejaring tertentu dan menghasilkan dampak tertentu bagi individu dan kelompok (Pratomo, 2015). Kata network menurut kamus Merriam-Webster adalah: *a) a system of lines, wires, etc., that are connected to each other, b) a system of computers and other devices (such as printers) that are connected to each other, c) a group of people or organizations that are closely connected and that work with each other.*

Dalam ilmu sosial istilah network digunakan pada tahun 1500-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan dan dependensi personal. Dalam kasus kebijakan publik, konsep ini memberi perhatian pada bagaimana kebijakan muncul dari kesalinghubungan (*interplay*) antara orang dan organisasi dan memberikan gambaran yang lebih informal tentang bagaimana kebijakan riil dilaksanakan (Suwitri, 2011).

Masih dalam ranah ilmu sosial, pada manajemen keorganisasian, jejaring sangat diperlukan untuk mendapatkan sebuah hubungan yang dinamis dalam melaksanakan segala aktivitasnya, bisa dalam hubungan sesama individu atau antar organisasi. Berikut adalah manfaat melakukan jejaring (Pratomo, 2015), di antaranya adalah:

1. Dapat bertukar ide, pengalaman, pikiran, serta ketrampilan dalam mencapai tujuan tertentu organisasi maupun pribadi.
2. Meningkatkan dukungan moral dan psikologis dalam mencapai tujuan organisasi atau pribadi. Hal ini diperoleh karena dengan mengetahui bahwa banyak organisasi lain maupun individu lain yang memperjuangkan atau mencapai tujuan yang sama atau hampir sama dapat memberikan support non fisik.
3. Memperluas pemahaman masalah tertentu. Masalah yang menjadi perhatian organisasi ataupun pribadi untuk dicarikan jalan keluar akan dilihat atau dibahas dari berbagai aspek keahlian maupun pengalaman dari anggota jejaring dengan demikian hal ini akan memperluas wawasan pemahaman terhadap masalah dan solusinya.

4. Memperkuat *bargaining power* (daya tawar) organisasi untuk advokasi. Masalah atau isu yang dihadapi organisasi maupun pribadi dan memerlukan perubahan kebijakan publik terkait akan berhasil dengan upaya advokasi yang baik.
5. Membangun solidaritas dan kekompakan. Di sini diartikan bahwa dengan melakukan jejaring berarti organisasi yang memiliki tujuan serupa beserta individu yang memiliki tujuan hampir sama bergabung dan ini tentu memperkuat solidaritas dan kekompakan untuk mencapai tujuan bersama.
6. Mencegah pengulangan (duplikasi) kegiatan serupa atau sama oleh organisasi tertentu serta organisasi lain yang memiliki tujuan serupa.

Dalam suatu organisasi, jejaring kebijakan ini akan disebut sub sistem kebijakan. Howlett dan Ramesh menyebut sub sistem kebijakan dibangun dari *sub-governments* yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat dan aktor pemerintah yang berinteraksi secara rutin dengan pola yang tetap, aktor dalam alternatif kebijakan tersebut dinamakan analisis kebijakan, organisasi yang mewadahi disebut sub sistem kebijakan, dan arena perannya membantu pemerintah maka disebut *sub-governments* (Howlett & Ramesh, 1995). Hubungan antara pemerintah dengan kelompok kepentingan dalam masyarakat ini disebut jaringan kebijakan.

Jejaring dalam kebijakan memiliki pengertian yang berbeda dengan partisipasi, Jejaring kebijakan bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan di antara partisipan, aktor pemerintah, swasta dan masyarakat.

Jejaring kebijakan juga berbeda dengan koordinasi, dalam koordinasi terkandung suatu *agreement* di antara aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan pemerintah sebagai aktor utama. Jejaring kebijakan justru mengandung konflik di antara aktor karena perbedaan kepentingan, namun konflik tersebut harus dapat dipersatukan dalam beberapa koalisi untuk mencapai tujuan dengan aktor utama tidak selalu dari unsur pemerintah.

Hubungan di antara para aktor dalam wadah organisasi merupakan sub sistem kebijakan. Sub sistem kebijakan sebagai jejaring kebijakan ruang gerak dibatasi oleh lingkungan, demikian juga hubungan di antara aktor dalam wadah organisasi atau sub sistem kebijakan dalam suatu batas lingkungan tertentu melandasi terbentuknya jejaring kebijakan. Warden menyebutkan jika hubungan pemerintah dengan kelompok kepentingan dalam masyarakat itu disebut jejaring kebijakan (Warden, 1992). Hubungan yang erat antara pemerintah dengan *stakeholders* dalam jejaring kebijakan inilah yang menentukan tercapainya kepentingan publik.

G. RANGKUMAN MATERI

Kebijakan publik merupakan hasil luaran dari pemerintah yang disusun berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjawab dan mengatur segala bentuk masalah yang ada di masyarakat.

Aktor dalam kebijakan publik terdiri dari tiga bagian yaitu pemerintah sebagai aktor publik, swasta sebagai aktor privat, dan *civil society* atau masyarakat. Sesesuai dengan prosesnya kebijakan publik disusun dari siklus kebijakan yang meliputi inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Perubahan kebijakan juga tidak dapat dipungkiri pada saat masalah yang ada di masyarakat sangat dinamis dan cepat berubah.

Faktor eksternal berupa lingkungan kebijakan juga sangat mempengaruhi kegunaan kebijakan tersebut dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Oleh karenanya perubahan kebijakan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan keadaan yang ada saat ini. Perubahan kebijakan terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) Perubahan sedikit dari kebijakan yang telah dievaluasi, (2) Perubahan dengan merubah statuta dalam area kebijakan tertentu, dan (3) Perubahan drastis. Adanya perubahan kebijakan secara cepat akan bisa dilaksanakan dengan baik pada saat ada jaringan antar aktor sehingga masalah yang ada di masyarakat akan bisa dengan cepat diselesaikan, oleh karenanya adanya jejaring kebijakan diperlukan dalam rangka proses yang berinteraksi dengan struktur jejaring tertentu dan menghasilkan dampak tertentu bagi individu dan kelompok.

TUGAS DAN EVALUASI

Berkah Pariwisata 2021 dari Krisis Covid-19

KONTAN.CO.ID - Menyikapi penutupan pintu masuk untuk semua warga negara asing ke Indonesia pada dua pekan awal tahun 2021, dapat dipahami dalam konteks prioritas keselamatan warga Indonesia. Patut kita dukung dan apresiasi kebijakan pemerintah yang jeli dan detil memperhatikan situasi global dari waktu ke waktu.

Kebijakan melarang warga negara asing masuk ke Indonesia dalam rangka memutus mata rantai persebaran Covid-19. Meski pun di sisi yang lain, situasi ini berdampak *flight cancellation*, *rescheduling* dan sebagainya, yang dinilai berdampak negatif secara ekonomi bagi industri pariwisata dalam negeri.

Indonesia berpengalaman mengelola krisis serupa pada masa sebelumnya, seperti krisis finansial global maupun krisis dalam negeri, meski situasinya tidak separah krisis yang terjadi pada saat ini. Krisis telanjur kita pahami sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan dan serba menakutkan. Krisis juga berkembang seiring dengan berbagai kesulitan hidup di masa pandemi Covid-19 ini.

Rhenald Kasali (2009: 35-36) menyatakan, krisis juga mengundang sebuah kesempatan dan harapan, yaitu kesempatan untuk tampil lebih baik, untuk merebut garis depan, untuk mengalahkan orang/perusahaan yang lemah. Setiap kali krisis terjadi, selalu diikuti lima hal sebagai berikut:

Pertama, krisis adalah gabungan dari bencana dan kesempatan; *Kedua*, krisis menghancurkan sekaligus menimbulkan pasar-pasar baru; *Ketiga*, krisis adalah alat bagi Yang Maha Kuasa untuk menghancurkan keangkuhan yang tampak dari begitu kuatnya resistensi-resistensi yang dilakukan manusia terhadap gagasan-gagasan perubahan.

Keempat, krisis adalah sebuah titik belok yang krusial, berbahaya kalau digas, sehingga diperlukan kehati-hatian dan ketepatan. Apabila berhasil melewati jalan berbelok, banyak peluang terbuka lebar. *Kelima*, terhadap peringatan akan datangnya krisis, belum tentu peringatan itu berakibat krisis.

Oleh karena itu, krisis harus dipahami dari kaca mata yang kontradiktif. Krisis adalah peringatan yang bisa berakibat fatal kalau kita tidak meresponsnya dengan cepat dan bijak. Jadi, tiada pilihan lain selain menunggu vaksinasi, mari bersama-sama menggunakan momentum ini untuk bekerja lebih keras dan lebih berani.

Sumber: <https://analisis.kontan.co.id/news/berkah-pariwisata-2021-dari-krisis-covid-19>,

Berdasarkan sumber bacaan dari Kontan, dapat diketahui bahwa Pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 ini mengalami beberapa perubahan mendasar terkait dengan segala aktivitas dan tata laku, oleh karena itu diperlukan beberapa perubahan kebijakan terkait dengan hal tersebut.

Coba saudara uraikan beberapa pertanyaan terkait dengan hal tersebut.

1. Menyikapi hal tersebut apakah Indonesia dibenarkan jika akan merubah kebijakan yang sudah ada terkait dengan pembukaan izin pembukaan tempat wisata dan izin bepergian baik domestik atau ke luar negeri?

2. Siapa aktor yang terlibat dalam perubahan kebijakan pariwisata di Indonesia?
3. Dengan adanya perubahan kebijakan terkait dengan pariwisata tentunya akan menimbulkan efek positif dan negatif, uraikan dengan jelas efek yang dimaksud!
4. Model perubahan kebijakan apa yang sesuai dengan keadaan yang ada tersebut?
5. Apakah ada pengaruh politik dalam perubahan kebijakan terkait pariwisata yang akan saudara tawarkan untuk mengatasi hal tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy-Making* (Third). Holt Rinehart & Winston.
- Arifia, I. (2020, April 22). *Mengupas Refomasi Kebijakan Publik Indonesia dari Masa ke Masa*. [Http://News.Unair.Ac.Id](http://News.Unair.Ac.Id).
<http://news.unair.ac.id/2020/05/22/mengupas-refomasi-kebijakan-publik-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
- Badjuri, A. K., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro.
- Chandler, R., Plano, J. C., & Chandler, Ralph C., Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro* (Hayat (ed.)). Prenada Media.
- Howlett, M., & Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Kartawijaya, V. (2018). *Perubahan dan Terminasi Kebijakan*.
<https://slideplayer.info/slide/12627530/>
- Keban, P. (2015). Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif. *Jejaring Administrasi Publik*, 2(VII).
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Second). Wadsworth.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik* (S. Mukaromah (ed.)). CALINA MEDIA.
- Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 1–13.
<https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.330>
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy* (5th ed.). Elex Media Komputindo.
- Pratomo, H. (2015). *Advokasi (Konsep, Teknik, dan Aplikasi) di Bidang Kesehatan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 179–198. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Suwitri, S. (2011). *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Pendidikan* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, 21(1–2), 29–52.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1992.tb00287.x>